

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari keterpaduan dan sinergisitas seluruh elemen perangkat daerah yang ada di dalamnya. Dukungan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh pihak pemerintah pusat ke pemerintah daerah pun menjadi faktor penting keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Salah satu langkah pendukung yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah memberikan kewenangan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang No. 12 Tahun 2008 maka berbagai kelemahan dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran pembangunan daerah diharapkan dapat disempurnakan. Otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 memberi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah, menetapkan kebijakan, serta melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri.

Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan keuangan daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK,SAP,2005). Sedangkan akuntabilitas itu sendiri adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (KK,SAP,2005). Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah berkewajiban mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penggunaan perangkat lunak sebagai alat bantu dalam sistem akuntansi dan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah secara akurat, tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Menurut Harahap (2010:105) laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan/organisasi. Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Dilihat dari sisi manajemen perusahaan

(pihak internal perusahaan), laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Beberapa peraturan perundang-undangan menyebutkan mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yaitu dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 99 ayat 2, yang berbunyi :“penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya”. Pemerintah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepatwaktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal. Keberhasilan suatu sistem informasi juga bergantung pada kualitas sistem dan pemanfaatan sistem tersebut oleh pemakai sistem karena teknologi sistem informasi diselenggarakan dalam suatu organisasi untuk membantu mereka dalam menyelesaikan tugasnya. Tidak jarang ditemukan bahwa teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi sering tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemakai sistem sehingga penerapan sistem informasi kurang memberikan manfaat atau bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali dalam peningkatan kinerja individu. Apabila kinerja setiap individu dapat dimaksimalkan maka akan berpengaruh pada

kinerja instansi secara keseluruhan. Untuk memperoleh kualitas informasi yang baik, maka dibutuhkan sistem aplikasi yang baik pula untuk dapat mengolah data menjadi informasi yang berguna. Selanjutnya, untuk mendapatkan sistem aplikasi yang baik, organisasi harus menggunakan sistem aplikasi dari pemberi jasa yang berkompeten dalam pembuatan sistem aplikasi yang dibutuhkan organisasi, yang dapat memuaskan kepentingan penggunanya. Kepuasan pengguna sistem informasi dapat dikatakan telah tercapai jika sistem informasi dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna sistem informasi dan mampu meningkatkan kinerja mereka secara optimal. Salah satu tolak ukur keberhasilan atas kinerja instansi adalah pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan reliabel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, mengungkapkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBN, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Hal ini juga diatur dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan kemudian direvisi menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah maka setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi Pemerintah Daerah yang meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan. Hal ini bertujuan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilaksanakan secara manual atau melalui aplikasi komputer. Oleh sebab itu, keandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sangat berhubungan erat dengan tingkat keandalan pelaporan keuangan. Kinerja atas laporan keuangan akan dinilai baik apabila dalam penyusunan laporan keuangan seluruh akun disajikan dan disusun secara jujur, benar dan teliti yang didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan lengkap. Oleh sebab itu untuk mengurangi ketidaktepatan dan menghindari kesalahan dalam penyusunan laporan keuangannya maka diperlukan suatu sistem yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu penerapan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga sistem akuntansi pemerintah perlu memanfaatkan semua jenis informasi dan teknologi agar efektifitas dan efisiensi penyusunan laporan keuangannya dapat tercapai.

Darise (2009:297) Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) bisa saja mengalami hambatan akibat ketidaksesuaian penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemerintah seperti diantaranya sumber daya manusia yang kurang, kapasitas memori dalam server yang kurang cukup, salah penginputan data, salah input kode transaksi, adanya

gangguan yang disebabkan terjadinya sistem yang eror, mesin yang bermasalah, serta disebabkan masalah teknis lainnya.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksinyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Dengan adanya SIPKD tersebut tentunya dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi, jika sukses diimplementasikan.

Badan Keuangan Kota Bukittinggi sebagai unit organisasi yang bergerak pada bidang Keuangan di bawah Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016. Badan Keuangan Kota Bukittinggi mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang keuangan, yang di pimpin oleh seorang kepala yang berkedaulatan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Keuangan Kota Bukittinggi sudah memanfaatkan SIPKD dalam mengelola keuangan daerah

serta menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sejak tahun 2011 untuk bidang Anggaran, Perbendaharaan dan bidang Keuangan, dan tahun 2015 untuk bidang Akuntansi hingga sekarang. Walaupun secara umum banyak manfaat yang ditawarkan oleh penerapan SIPKD antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, biaya pemrosesan yang lebih rendah, namun pengimplementasian SIPKD pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi juga memiliki kendala yang berkaitan dengan jaringan yang terganggu jika cuaca buruk, kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data serta terbatasnya sumber daya manusia yang ada menjadi penyebab buruknya pengelolaan keuangan.

Indriasari (2008), Harifan (2009) dan Yosefriandi (2013), menemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan hubungannya positif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji apakah penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan di Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penulis adalah apakah penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi?

1.3 Batasan Masalah

Dalam hal ini, agar pembahasan tidak terlalu melebar maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan ini. Permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini adalah:

1. Pengaruh penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
2. Kuesioner dibuat oleh penulis sebanyak 10 butir pertanyaan berdasarkan 5 dimensi dari variabel SIPKD yaitu kualitas data input, kompetensi SDM, dukungan manajemen puncak, persepsi keberhasilan system, dan implementasi SIPKD, serta berdasarkan 4 dimensi dari variabel LKPD yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
3. Skoring dilakukan pada setiap pilihan jawaban pada kuesioner yang disebarakan kepada 30 orang responden pada Badan Keuangan Kota

Bukittinggi dengan karakteristik bekerja pada bidang yang menggunakan SIPKD.

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh antara penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya terkait dengan penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk dapat mengevaluasi penerapan sistem informasi pengelolaan daerah (SIPKD) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bukittinggi.

1.6 Kerangka Penulisan Skripsi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.5 Kerangka Penulisan Skripsi

II. LANDASAN TEORI

2.1 Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD)

2.2 Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3 Tinjauan pustaka

2.4 Pengembangan hipotesis

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.2 Metode Analisis Data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.2 Analisis Data

4.3 Pembahasan

V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

5.2 Implikasi/Saran

5.3 Keterbatasan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN